

**PENGARUH KEJELASAN SASARAN ANGGARAN, PENGENDALIAN
AKUNTANSI, KOMPETENSI APARATUR PEMERINTAH DAERAH,
SISTEM PELAPORAN, DAN KETAATAN PADA PERATURAN
PERUNDANGAN TERHADAP AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Agam)**

Oleh:
Imam Wahid
Pembimbing: Azwir Nasir dan Supriono

Faculty of economics, Riau University, Pekanbaru, Indonesia
E-mail: imamwahid6894@yahoo.com

*The Effect Of Budget Goal Clarity, Accounting Control, Local Government
Official Competence, Reporting System, And Obedience to the Laws and
Regulations on the Performance Accountability Of
Government Institution
(Empirical studies on the Government of Agam District)*

ABSTRACT

This study aimed to determine the effect of budget goal clarity, accounting control, local government official competence, reporting system, and obedience to the laws and regulations on the performance accountability of government institution in Agam district. The population in this study is 27 government agencies. The sample use were are 51 respondents. The type of data used is primary data by using questionnaire. The analysis tool is using multiple regression with software SPSS version 21. The result show that: 1) budget goal clarity has significant effect on the performance accountability of government institution, 2) accounting control has not significant effect on the performance accountability of government institution, 3) local government official competence has significant effect on the performance accountability of government institution, 4) reporting system has significant effect on the performance accountability of government institution, and 5) obedience to the laws and regulation has significant effect on the performance accountability of government institution. All of the independent variables are influence the dependent variables as much as 52,1%, while 47,9% is influenced by other unclear variables.

Keywords: budget goal clarity, accounting control, local government official competence, reporting system, and obedience

PENDAHULUAN

Sebagai salah satu upaya dan tujuan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik yaitu dengan

penerapan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada pengelolaan pemerintah pusat maupun daerah.

Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (LAN, 2003).

Akuntabilitas terkait erat dengan instrument untuk kegiatan kontrol terutama dalam hal pencapaian hasil pada pelayanan publik dan menyampaikannya secara transparan kepada masyarakat. Akuntabilitas publik sesuai dengan karakteristik *good governance* berkenaan dengan 1) partisipasi, 2) aturan hukum, 3) transparansi, 4) responsive, 5) orientasi consensus, 6) kesetaraan, 7) efektivitas dan efisiensi, dan 8) visi strategi (LAN, 2003).

Menurut Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 atas LAKIP Kabupaten Agam Tahun 2013 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kabupaten Agam diberikan predikat C (skor >30-50) atau Agak Kurang. Maksudnya disini adalah Kabupaten Agam memiliki sistem untuk manajemen kinerja tetapi kurang dapat diandalkan, perlu banyak perbaikan dan termasuk perbaikan mendasar. Sedangkan pada tahun 2012 yang lalu, Kabupaten Agam berhasil mendapat predikat Cc (skor >50-65) atau Cukup Baik atas LAKIP Kabupaten Agam tahun 2012.

Variabel bebas pertama dalam penelitian ini adalah kejelasan sasaran anggaran. Kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara

jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dipahami oleh pihak yang bertanggungjawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut (Bastian, 2010).

Variabel bebas kedua adalah pengendalian akuntansi (*accounting control*). Kusumaningrum (2010) mengatakan bahwa sistem pengendalian yang menggunakan informasi akuntansi disebut sebagai sistem pengendalian yang berbasis akuntansi atau sering disebut sistem pengendalian akuntansi. Sistem pengendalian akuntansi adalah suatu prosedur dan sistem formal yang menggunakan informasi untuk menjaga atau mengubah pola aktivitas organisasi.

Variabel bebas ketiga adalah kompetensi aparatur pemerintah daerah. Dikaitkan dengan kompetensi, Robbins (2000) mengemukakan bahwa kompetensi mempengaruhi langsung tingkat kinerja organisasi. Dengan memiliki aparatur yang mempunyai kompetensi yang tinggi akan meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan.

Variabel bebas keempat adalah sistem pelaporan. Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (2000), mengemukakan laporan yang baik adalah laporan yang harus disusun secara jujur, objektif, dan transparan.

Variabel bebas kelima adalah ketaatan pada peraturan perundangan. Sebagai negara berlandaskan hukum, ketaatan pada peraturan perundangan merupakan suatu bentuk kepatuhan pada aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh lembaga negara yang berwenang agar dipatuhi oleh seluruh warga

negara dan berskala nasional. Dengan adanya landasan hukum, diharapkan setiap aparatur pemerintahan harus konsisten dan taat dalam menjalankan tugas dan kewajibannya demi terwujudnya pemerintahan yang berakuntabilitas kinerja yang baik.

Adapun objek penelitian yang dipilih adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Agam. Pada semester II Tahun 2014 lalu, BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas LKPD Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2013.

Penelitian ini merupakan replikasi sekaligus pengembangan dari penelitian Setiawan (2013) dengan judul “Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pelalawan.”

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1) Apakah kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Agam?, 2) Apakah pengendalian akuntansi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Agam?, 3) Apakah kompetensi aparatur pemerintah daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Agam?, 4) Apakah sistem pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Agam?, 5) Apakah ketaatan pada peraturan perundangan berpengaruh terhadap akuntabilitas

kinerja instansi pemerintah Kabupaten Agam ?.

Berdasarkan uraian dari perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk membuktikan secara empiris pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, 2) Untuk membuktikan secara empiris pengaruh pengendalian akuntansi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, 3) Untuk membuktikan secara empiris pengaruh kompetensi aparatur pemerintah daerah terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, 4) Untuk membuktikan secara empiris pengaruh sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, 5) Untuk membuktikan secara empiris pengaruh ketaatan pada peraturan perundangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

TELAAH PUSTAKA

Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap AKIP

Kejelasan sasaran anggaran adalah sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggungjawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut (Bastian, 2010). Oleh sebab itu, sasaran anggaran daerah harus dinyatakan secara jelas, spesifik dan dapat dimengerti oleh mereka yang bertanggungjawab untuk penyusunan dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah agar semakin meningkat.

H1: Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh terhadap

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengaruh Pengendalian Akuntansi Terhadap AKIP

Pengendalian akuntansi diperlukan untuk menyusun rencana, metode, dan prosedur organisasi untuk menjaga kekayaan instansi dan reliabilitas data keuangan.

Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010, maka laporan keuangan pemerintah sudah menggunakan pengendalian akuntansi. Pengendalian akuntansi (*accounting control*) adalah prosedur dan dokumentasi yang terkait untuk mengamankan aset, melaksanakan dan mencatat transaksi keuangan dan memastikan keandalan catatan keuangan (Hery, 2009). Melalui pengendalian akuntansi yang baik, akan tersusun pelaksanaan kinerja keuangan dengan baik sehingga memudahkan proses pengambilan keputusan.

H2: Pengendalian Akuntansi berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap AKIP

Kompetensi aparatur pemerintah memungkinkan untuk tercapainya suatu Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang efektif. Sesuai dengan salah satu prinsip Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yaitu berdasarkan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena kompetensi akan

mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas pemerintah yang umum, pembangunan dan kemasyarakatan akan dapat tercapai dengan baik apabila adanya dukungan pengelolaan sumber daya manusia, peralatan/sarana dan prasarana, biaya atau anggaran serta dukungan tugas-tugas umum lainnya.

H3: Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengaruh Sistem Pelaporan Terhadap AKIP

Pemerintah daerah selaku pengelola dana publik harus mampu menyediakan informasi keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu, konsisten, dan dapat dipercaya (Kusumaningrum, 2010). Laporan tersebut merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah. Oleh karena itu, sistem pelaporan yang baik adalah yang mampu menyajikan informasi secara transparan dan akuntabel mengenai keputusan-keputusan yang telah diambil pemerintah daerah dalam suatu periode. Bentuk pelaporan keuangan daerah menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 yang digunakan saat ini ada 7 jenis, yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Sisa Lebih Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

H4: Sistem Pelaporan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengaruh Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Terhadap AKIP

Ketaatan pada peraturan perundangan adalah suatu bentuk kepatuhan pada aturan-aturan yang telah dibuat oleh lembaga negara yang berwenang untuk dipatuhi oleh seluruh warga negara dan berskala nasional. Berdasarkan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditetapkan oleh LAN (2003), menyatakan bahwa pelaksanaan AKIP harus berdasarkan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Mengacu pada bidang administrasi pemerintah, telah dihasilkan pula peraturan perundangan, berupa Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab.

H5: Ketaatan Pada Peraturan Perundangan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini berjumlah 27 SKPD yang berada di lingkungan Kabupaten Agam. Pemilihan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling*. Sampel dalam penelitian ini terdiri dari kepala pimpinan/dinas SKPD dan

sub bagian keuangan. Jumlah sampel berjumlah 54 responden.

Penelitian ini menggunakan data primer yang bersumber dari jawaban responden atas pertanyaan yang berhubungan dengan Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah, Sistem Pelaporan, dan Ketaatan pada Peraturan Perundangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada SKPD Kabupaten Agam. Data penelitian ini dikumpulkan dengan menyebarkan kuesioner secara langsung kepada responden.

Definisi Operasional Dan Pengukuran Variabel

a. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2009). Variabel ini diukur dengan menggunakan instrument yang dikembangkan oleh Mardiasmo (2002) dalam Herawaty (2011).

b. Kejelasan Sasaran Anggaran

Kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran yang ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh pihak yang bertanggungjawab atas pencapaian sasaran tersebut (Kenis, 1979 dalam Cefrida, 2014).

Variabel ini diukur dengan menggunakan instrument yang dikembangkan oleh Abdul Halim (2002) dalam Herawaty (2011).

c. Pengendalian Akuntansi

Pengendalian akuntansi (*accounting control*) adalah prosedur dan dokumentasi yang terkait untuk mengamankan aset, melaksanakan dan mencatat transaksi keuangan dan memastikan keandalan catatan keuangan (Hery, 2009). Variabel ini diukur dengan menggunakan instrument yang dikembangkan oleh Anthony (2000) dalam Herawaty (2011).

d. Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah

Kompetensi aparatur pemerintah daerah didefinisikan sebagai kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keahlian, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam melaksanakan tugas dan jabatannya di instansi pemerintah (Prayitno, 2003). Variabel ini diukur dengan menggunakan instrument yang dikembangkan oleh Oktriandra (2010).

e. Sistem Pelaporan

Sistem pelaporan adalah suatu sistem yang diperlukan untuk memantau dan mengendalikan kinerja manajer melalui informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik oleh pihak-pihak berkepentingan (Riani, 2015). Variabel ini diukur dengan menggunakan instrument yang dikembangkan oleh Anthony (2000) dalam Herawaty (2011).

f. Ketaatan Pada Peraturan Perundangan

Ketaatan pada peraturan perundangan adalah kepatuhan seseorang dalam menaati peraturan yang telah dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat berwenang dan mempunyai kekuatan mengikat agar dapat mengatur dan menertibkan setiap kehidupan berbangsa dan bernegara (Soleman, 2007). Variabel ini diukur dengan menggunakan instrument yang dikembangkan oleh Pamungkas (2012).

Pengukuran Variabel

Dalam penelitian ini, pengukuran variabel dengan menggunakan 5 (lima) poin skala *Likert* dimana poin 1 (satu) menunjukkan sangat sedikit, poin 2 (dua) menunjukkan sedikit, poin 3 (tiga) menunjukkan separuh, poin 4 (empat) menunjukkan banyak, dan poin 5 (lima) menunjukkan sangat banyak. Dengan menggunakan skala *Likert* ini dapat membuat pengukuran menjadi lebih baik dan mudah dipahami oleh responden untuk melakukan pengisian kuesioner.

Metode Analisis

Uji yang digunakan peneliti dalam metode analisis data yaitu: 1) Uji Kualitas Data yang terdiri dari Uji Validitas Data dan Uji Reliabilitas Data, 2) Uji Asumsi Klasik yang digolongkan berdasarkan yaitu Uji Normalitas Data, Uji Multikolinieritas Data, Uji Heterokedastisitas Data, dan Uji Autokorelasi Data, dan 3) Analisis Regresi Linear Berganda yang dibagi menjadi Uji Hipotesis (Uji $-t$) dan Uji Koefisien Determinasi (Uji R^2).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

Di dalam penelitian ini, populasi yang digunakan adalah pegawai negeri sipil yang bekerja dilingkungan SKPD Kabupaten Agam. Penyebaran kuesioner dalam penelitian ini dilakukan dengan cara memberikan secara langsung kuesioner kepada masing-masing responden yaitu kepala pimpinan/dinas SKPD dan sub bagian keuangan di satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Agam. Semua SKPD (100%) di Kabupaten Agam telah menerima kuesioner yang diserahkan oleh penulis. Dan kuesioner yang berhasil kembali sebesar 51 kuesioner atau 94,4%.

Hasil Statistik Deskriptif

Gambaran mengenai variabel-variabel penelitian yaitu Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah, Sistem Pelaporan, Ketaatan Pada Peraturan Perundangan, dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada SKPD Kabuapten Agam disajikan dalam tabel *descriptive statistic* yang menunjukkan angka minimum, maksimum, *mean*, dan standar deviasi yang dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini:

Tabel 1
Hasil Statistik Deskriptif

	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
AKI P	51	27	40	33.549	3.17058
KSA	51	15	25	20.6078	3.29289

PA	51	10	20	15.3725	3.16835
KAP D	51	40	72	54.8824	8.60615
SP	51	9	20	15.549	2.4764
KPP P	51	6	15	11.549	2.30055
Valid N (list wise)	51				

Sumber: Data Olahan 2015

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa: variabel (Y) mempunyai jumlah responden (n) sebanyak 51, nilai minimum adalah 27, nilai maksimum adalah 40, dan nilai rata-rata (*mean*) adalah 33,549. (X1) mempunyai jumlah responden (n) sebanyak 51, nilai minimum adalah 15, nilai maksimum adalah 25, dan nilai rata-rata (*mean*) adalah 20,6078. (X2) mempunyai jumlah responden (n) sebanyak 51, nilai minimum adalah 10, nilai maksimum adalah 20, dan nilai rata-rata (*mean*) adalah 15,3725. (X3) mempunyai jumlah responden (n) sebanyak 51, nilai minimum adalah 40, nilai maksimum adalah 72, dan nilai rata-rata (*mean*) adalah 54,8824. (X4) mempunyai jumlah responden (n) sebanyak 51, nilai minimum 9, nilai maksimum adalah 20, dan nilai rata-rata (*mean*) adalah 15,549. (X5) mempunyai jumlah responden (n) sebanyak 51, nilai minimum adalah 6, nilai maksimum adalah 15, dan nilai rata-rata (*mean*) adalah 11,549.

Hasil Uji Validitas Data

Uji validitas data digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. Dimana keseluruhan variabel penelitian terdiri dari 43 butir pernyataan yang harus dijawab oleh responden. Uji signifikansi dilakukan dengan membandingkan

nilai r hitung dengan r tabel untuk *degree of freedom* (df) = n-2 dengan alpha 0,05. (n) adalah jumlah sampel (Ghozali, 2013:53). Dalam penelitian ini df = n-2 = 49, sehingga didapat r tabel untuk df (49) = 0,276.

Hasil Uji Reliabilitas Data

Tabel 2
Hasil Uji Reliabilitas Data

No	Instrumen Variabel Penelitian	Nilai Cronbach's Alpha	Nilai Kritis
1	AKIP (Y)	0.718	0.6
2	Kejelasan Sasaran Anggaran (X1)	0.852	0.6
3	Pengendalian Akuntansi (X2)	0.883	0.6
4	Komptensi Aparatur Pemerintah Daerah (X3)	0.822	0.6
5	Sistem Pelaporan (X4)	0.716	0.6
6	Ketaatan Pada Peraturan Perundangan (X5)	0.864	0.6

Sumber: Data Olahan 2015

Berdasarkan hasil uji reliabilitas diatas terlihat bahwa variabel Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah, Sistem Pelaporan, dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan adalah reliabel. Jadi pernyataan yang digunakan untuk mengukur keseluruhan variabel yang

diteliti dalam penelitian ini dinyatakan reliabel.

Hasil Analisis Linear Berganda

Tabel 3
Hasil Analisis Linear Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	13.152	2.968		4.431	.000
	KS A	.277	.110	.288	2.514	.016
	PA	-.103	.137	-.103	-.754	.455
	KA PD	.108	.049	.293	2.183	.034
	SP	.326	.133	.255	2.457	.018
	KP PP	.458	.206	.332	2.222	.031

Sumber: Data Olahan 2015

Berdasarkan tabel 3 yang didapat dari hasil analisis menggunakan bantuan SPSS versi 21, maka didapat persamaan regresi linear bergandanya adalah sebagai berikut:

$$Y = 13,152 + 0,277X1 - 0,103X2 + 0,108X3 + 0,326X4 + 0,458X5 + e$$

Arti angka-angka dalam persamaan regresi diatas sebagai berikut:

- 1) Nilai konstanta (a) sebesar 13,152. Artinya adalah apabila variabel independen diasumsikan nol (0), maka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebesar 13,152.

- 2) Nilai koefisien regresi variabel kejelasan sasaran anggaran sebesar 0,277. Artinya adalah bahwa setiap kejelasan sasaran anggaran sebesar satu (1) satuan maka akan meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebesar 0,277 dengan asumsi variabel lain tetap.
- 3) Nilai koefisien regresi variabel pengendalian akuntansi sebesar (-0,103). Artinya adalah bahwa setiap pengendalian akuntansi satu (1) satuan maka akan menurunkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebesar 0,103 dengan asumsi variabel lain tetap.
- 4) Nilai koefisien regresi variabel kompetensi aparatur pemerintah daerah sebesar 0,108. Artinya adalah bahwa setiap kompetensi aparatur pemerintah daerah sebesar satu (1) satuan maka akan meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebesar 0,108 dengan asumsi variabel lain tetap.
- 5) Nilai koefisien regresi variabel sistem pelaporan sebesar 0,326. Artinya adalah bahwa setiap sistem pelaporan sebesar satu (1) satuan maka akan meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebesar 0,326 dengan asumsi variabel lain tetap.
- 6) Nilai koefisien regresi variabel ketaatan pada peraturan perundangan sebesar 0,458. Artinya adalah bahwa setiap ketaatan pada peraturan perundangan sebesar satu (1) satuan maka akan meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebesar 0,458 dengan asumsi variabel lain tetap.
- 7) Standar error (e) menunjukkan tingkat kesalahan pengganggu.

Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (H₁)

Hipotesis pertama yang diajukan dalam penelitian ini adalah untuk menguji apakah Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dari hasil perhitungan SPSS 21 *for windows*, diperoleh nilai $t_{hitung} 2,514 > t_{tabel} 1,8$, $t_{tabel} (\alpha = 0,05 \text{ dan } df = 45)$ dan signifikansi sebesar 0,016 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$.

Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa kejelasan sasaran anggaran secara parsial berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah, sehingga hipotesis 1 diterima. Kejelasan sasaran anggaran memperlihatkan secara pasti sasaran yang akan dicapai oleh aparat sehingga mereka memiliki informasi yang cukup. Kecukupan informasi ini tentunya akan mendorong kinerja aparat dalam pencapaian tujuan organisasi yang berdampak pada akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Adanya sasaran anggaran yang jelas, maka akan mempermudah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas organisasi dalam rangka untuk mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Wahyuni (2014), Yulianti (2014), Cefrida (2014) dan Setiawan (2013) yang menyatakan Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.

Pengaruh Pengendalian Akuntansi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Hipotesis kedua yang diajukan dalam penelitian ini adalah untuk menguji apakah Pengendalian Akuntansi berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dari hasil perhitungan SPSS 21 *for windows*, diperoleh nilai $t_{hitung} (-0,754) < t_{tabel} (1,8)$ ($\alpha = 0,05$ dan $df = 45$) dan signifikansi sebesar 0,455 lebih besar dari $\alpha = 0,05$.

Dari data tersebut, dapat disimpulkan Pengendalian Akuntansi secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sehingga hipotesis 2 ditolak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengendalian Akuntansi yang dilakukan oleh pemerintah daerah tidak berperan dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahnya. Artinya, adanya kelemahan pengendalian akuntansi dalam pengamanan asset, transaksi keuangan dan memastikan keandalan catatan keuangan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Dilihat dari opini BPK RI Kabupaten Agam tahun 2014, BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan, yaitu: (1) Proses penyusunan anggaran Tahun 2013 pada Pemerintah Kabupaten Agam tidak sesuai ketentuan, (2) Sistem Pengendalian Intern atas pengelolaan Kas Daerah pada Kabupaten Agam tidak memadai, (3) Penyajian nilai Investasi Non Permanen Dana Bergulir pada Neraca per 31 Desember 2013 tidak didukung dengan data yang memadai, (4) Pengelolaan Investasi Permanen

tidak memadai, (5) Nilai Aset Tetap dan Aset Lainnya pada Neraca Pemerintah Kabupaten Agam Per 31 Desember 2013 tidak dapat diyakini kewajarannya, dan (6) Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah tidak tertib.

Hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian Setiawan (2013), dan Yulianti (2014) yang menyatakan bahwa pengendalian akuntansi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Namun hasil ini penelitian ini sejalan dengan penelitian Wahyuni (2014) dan Cefrida (2014) yang menyatakan pengendalian akuntansi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja.

Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Hipotesis ketiga yang diajukan dalam penelitian ini adalah untuk menguji apakah Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dari hasil perhitungan SPSS 21 *for windows*, diperoleh nilai $t_{hitung} 2,183 > t_{tabel} 1,8$, t_{tabel} ($\alpha = 0,05$ dan $df = 45$) dan signifikansi sebesar 0,034 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$.

Dari data tersebut, dapat disimpulkan Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sehingga hipotesis 3 diterima. Dalam teori yang diperkenalkan McClelland dalam Oktriandra (2010) mendefinisikan kompetensi sebagai karakteristik yang mendasar yang dimiliki

seseorang yang berpengaruh langsung terhadap kinerja yang sangat baik. Sebuah akuntabilitas merupakan *output* dari suatu kinerja, maka dari pengertian tersebut dapat dinyatakan bahwa kompetensi yang dimiliki seseorang akan juga berpengaruh terhadap akuntabilitas baik langsung ataupun tidak langsung. Semakin tinggi kompetensi yang digambarkan dengan pengalaman dan tingkat pendidikan yang tinggi akan menunjang hasil kinerja yang berkualitas.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Oktriandra (2010) dan Zirman (2010) yang menyatakan Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.

Pengaruh Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Hipotesis keempat yang diajukan dalam penelitian ini adalah untuk menguji apakah Sistem Pelaporan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dari hasil perhitungan SPSS 21 *for windows*, diperoleh nilai $t_{hitung} 2,457 > t_{tabel} 1,8$, $t_{tabel} (\alpha = 0,05 \text{ dan } df = 45)$ dan signifikansi sebesar 0,018 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$.

Dari data tersebut, dapat disimpulkan Sistem Pelaporan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sehingga hipotesis 4 diterima. Dalam hal ini SKPD di Kabupaten Agam sudah menerapkan sistem pelaporan yang baik sesuai dengan PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Wahyuni (2014), Yulianti (2014), dan Herawaty (2012) yang menyatakan Sistem Pelaporan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.

Pengaruh Ketaatan Pada Peraturan Perundangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Hipotesis kelima yang diajukan dalam penelitian ini adalah untuk menguji apakah Ketaatan Pada Peraturan Perundangan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dari hasil perhitungan SPSS 21 *for windows*, diperoleh nilai $t_{hitung} 2,222 > t_{tabel} 1,8$, $t_{tabel} (\alpha = 0,05 \text{ dan } df = 45)$ dan signifikansi sebesar 0,031 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$.

Dari data tersebut, dapat disimpulkan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sehingga hipotesis 5 diterima. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sendiri merupakan bagian dari peraturan perundangan yang harus ditaati. Soleman (2007) mengemukakan untuk pelaksanaan penerapan akuntabilitas haruslah didukung oleh peraturan perundangan yang memadai. Sistem hukum yang dianut dalam sistem akuntansi sektor publik adalah sistem *civil law*, dimana setiap aturan yang berhubungan

dengan akuntansi sektor publik dimuat dalam bentuk peraturan perundangan. Aparat publik diwajibkan untuk menaati peraturan perundangan yang berlaku. Artinya, Ketaatan pada peraturan perundangan akan mendorong kelancaran program sehingga tercapainya sasaran atau tujuan yang dikehendaki yang akan mewujudkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada SKPD Kabupaten Agam.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Riantiarno (2011) dan Zirman (2010) yang menyatakan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa besar kemampuan variabel-variabel independen dalam menerangkan variasi variabel dependen. Berikut hasil uji koefisien determinasi dalam penelitian ini:

Tabel 4
Hasil Uji Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.754 ^a	.569	.521	2.19363	1.850

Sumber: Data Olahan 2015

Berdasarkan tabel diatas, diketahui nilai Adjusted R Square sebesar 0,521. Artinya adalah bahwa sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen adalah sebesar 52,1% . Sedangkan sisanya 47,9%

dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi ini.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Penelitian ini dilakukan terhadap 54 responden yang merupakan kepala pimpinan/dinas SKPD dan sub bagian keuangan yang bekerja di Kabupaten Agam.
- 2) Penelitian ini menyebarkan kuesioner sebanyak 54 kuesioner dan yang kembali sebanyak 51 kuesioner atau 94,4%.
- 3) Secara umum hasil pengujian validitas dan reliabilitas telah memberikan hasil yang baik dan patut dipertimbangkan untuk penelitian selanjutnya. Begitu juga dengan semua asumsi klasik yang diperoleh telah menunjukkan bahwa normalitas rata-rata jawaban responden yang menjadi data dalam penelitian ini terdistribusi secara normal, semua model terbebas dari multikolinearitas, heterokedastisitas, dan autokorelasi.
- 4) Hasil uji t menunjukkan bahwa variabel kejelasan sasaran anggaran, kompetensi aparatur pemerintah daerah, sistem pelaporan, dan ketaatan pada peraturan perundangan memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sedangkan variabel pengendalian akuntansi tidak memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

5) Nilai *Adjusted R Square* didalam penelitian ini adalah sebesar 0,521. Artinya bahwa variabel kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, kompetensi aparatur pemerintah daerah, sistem pelaporan, dan ketaatan pada peraturan perundangan (independen) sebesar 52,1% sedangkan sisanya sebesar 47,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model ini.

Saran

Berdasarkan evaluasi atas hasil penelitian dan keterbatasan yang ada dalam penelitian ini, beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk peneliti selanjutnya, antara lain: 1) Peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel independen yang memungkinkan dapat mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, 2) Peneliti selanjutnya dapat menambah jumlah sampel penelitian, agar hasil penelitian yang diperoleh bisa menjelaskan mengenai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah secara umum, dan 3) Peneliti selanjutnya dapat memperluas objek penelitian agar bisa memberikan gambaran yang lebih jelas ke semua objek mengenai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat. 2014. *Laporan Hasil Pemeriksaan Atas LKPD Kabupaten Agam Tahun 2013*. Siaran Pers

Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Erlangga, Jakarta

Cefrida, Mentari. 2014. *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Akuntansi Sektor Publik dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Pekanbaru*. Skripsi. Universitas Riau, Pekanbaru

Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS 20*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang

Herawaty, Netty. 2011. *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Jambi*. Jurnal. Universitas Jambi, Jambi

Hery. 2009. *Teori Akuntansi*. Kencana, Jakarta

Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Kusumaningrum, Indraswari. 2010. *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan terhadap AKIP Provinsi Jateng*. Tesis. Program Pasca Sarjana UNDIP, Semarang

Lembaga Administrasi Negara. 2003. *Pedoman Penyusunan*

- Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*
- LAN & BPKP. 2000. *Akuntabilitas dan Good Governance*, Penerbit LAN
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*, Andi Offset, Yogyakarta
- Pamungkas, Bambang. 2012. *Pengaruh penerapan akuntansi publik dan kualitas peraturan perundangan terhadap kualitas laporan keuangan dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah*. Jurnal Ilmiah Ranggagading, Volume 12 No. 1, April 2012 : 1- 10
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- Prayitno, Widodo dan Suprpto. 2003. *Standarisasi Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Menuju Era Globalisasi Global; Seri Kertas Kerja Volume II Nomor 05*. Pusat Penelitian dan Pengembangan BKN, Jakarta
- Oktrianda, S. 2010. *Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah, Penerapan Akuntabilitas Keuangan, dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kota Dumai*. Skripsi. Universitas Riau, Pekanbaru
- Riani, Isti. 2015. *Pengaruh Penerapan Akuntansi Keuangan Daerah, Penerapan Akuntabilitas Keuangan, dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat*. Skripsi. Universitas Riau, Pekanbaru
- Riantiarno, Reynaldi dan Nur Azlina. 2011. *Faktor – faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (studi pada SKPD Kab.Rokan hulu)*. Skripsi. Universitas Riau, Pekanbaru
- Robbins, Sthepen P. 2000. *Perilaku Organisasi, Konsep-Kontroversi-Aplikasi. Edisi Bahasa Indonesia. Jilid I*. Prenhallindo, Jakarta
- Setiawan, Eko. 2013. *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan terhadap*

*Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (studi
kab.pelalawan).* Skripsi.
Universitas Riau, Pekanbaru

Pemerintah. Skripsi.
Universitas Riau, Pekanbaru

Soleman, Rusman. 2007. *Pengaruh
Kompetensi, Penerapan
Akuntabilitas Keuangan, dan
Ketaatan pada Peraturan
Perundangan terhadap
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (AKIP).*
Disertasi. Universitas
Padjajaran, Bandung

Wahyuni. 2014. *Pengaruh Kejelasan
Sasaran Anggaran,
Pengendalian Akuntansi dan
Sistem Pelaporan terhadap
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (Studi Pada
Satuan Kerja Perangkat
Daerah Kabupaten Rokan
Hulu).* Skripsi. Universitas
Riau, Pekanbaru

Yulianti, Reni. 2014. *Pengaruh
Kejelasan Sasaran Anggaran,
Kesulitan Sasaran Anggaran,
Pengendalian Akuntansi Dan
Sistem Pelaporan terhadap
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (Studi Empiris
Pada SKPD Kab.Pelalawan).*
Skripsi. Universitas Riau,
Pekanbaru

Zirman, Edfan Darlis, dan R.
Muhammad Rozi. 2010.
*Pengaruh Kompetensi
Aparatur Pemerintah
Daerah, Penerapan
Akuntabilitas Keuangan,
Motivasi Kerja, Dan
Ketaatan Pada Peraturan
Perundangan terhadap
Akuntabilitas Kinerja Instansi*